

amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa menambah ataupun mengurangi amanah tersebut.

Beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) juga disiapkan untuk memperjelas pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan. Arah-an yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus diterapkan atau dijalankan, karena dengan model pemerintah tersebut pembangunan di seluruh penjuru Indonesia akan terlaksana. Setelah pembangunan berjalan dengan baik, program pemerintah yang telah dicanangkan bisa terealisasi dengan baik di seluruh penjuru Indonesia. Kebijakan ini akan menghasilkan masyarakat yang mampu berperanserta dalam menentukan prioritasnya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup yang sesuai dengan peluang dan batasan kepentingan nasional.

Kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dikenal dengan desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat. Dua manfaat tersebut yaitu; Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah dalam memiliki informasi secara lengkap.

Penyerahan kewenangan dari puncak ke level yang lebih rendah pada pemerintahan, dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Menurut Mardiasmo (2009:20) pemerintah daerah memiliki dua jenis

pertanggungjawaban dalam melaksanakan pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut antara lain: Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat; kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut adalah elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus memertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Menurut Cahyani & Utama (2015), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu memertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pengungkapan tersebut, pemerintah harus mau serta mampu menjadi subyek pemberi informasi. Informasi tersebut terdiri atas aktivitas dan kinerja yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat yang berupa hak untuk mendapatkan informasi, hak diberi penjelasan, hak untuk diperhatikan pendapatnya, serta hak menuntut pertanggungjawaban.

Pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal dalam menghadapi akuntabilitas, diantaranya kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Schaeffer & Yilmaz (2008), Anjarwati (2012), Emilia (2013), Suwandi

(2013), Primayoni dkk., (2014), Dewi & Supadmi (2015), Cahyani & Utama (2015), Hidayatullah & Herdjiono (2015), serta Zakiyudin & Suyanto (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herawaty (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan Pangumbalerang & Pinatik (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Berry (2005), Cahyani & Utama (2015), Hidayatullah & Herdjiono (2015), serta Zakiyudin & Suyanto (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herawaty (2012) dan Anjarwati (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Yaacob & Nahar (2011), Herawaty (2012), Anjarwati (2012), Risuli (2014), Cahyani & Utama (2015), Hidayatullah & Herdjiono (2015), serta Zakiyudin & Suyanto (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

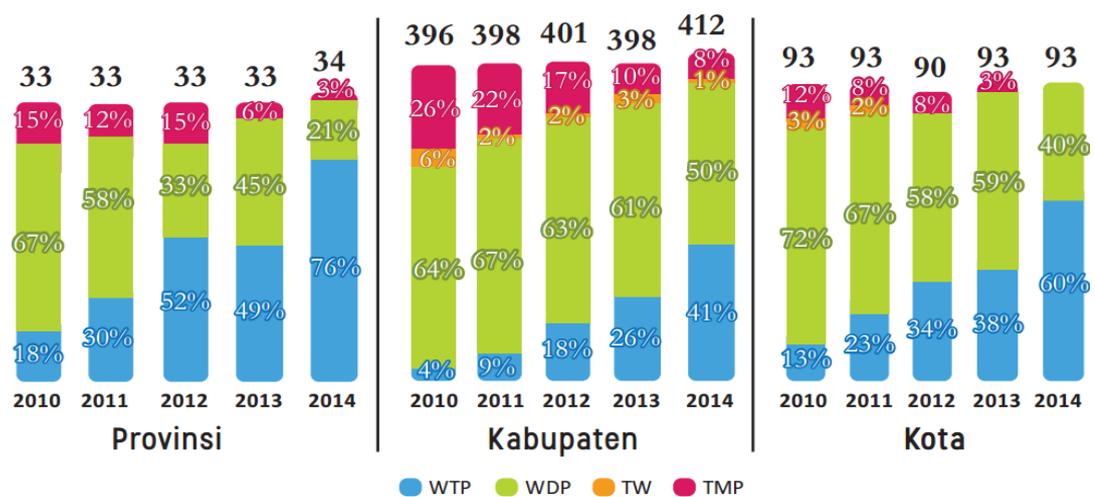
Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sesuai dengan konsep *good governance* yang menargetkan terselenggaranya pembinaan secara spesifik dan teknis mengenai penyusunan program kerja secara efisien dan efektif. Pada dasarnya *good governance* menjadi dasar dari terciptanya pemerintahan yang baik dan berkualitas, serta dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat (Zeyn, 2011). Tetapi fenomena yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara belum dapat mengoptimalkan kemampuan/pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal tersebut sesuai dengan LAKIP yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013.

TABEL 1.1.
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Misi	Target Sasaran	Telah Tercapai	Tidak tercapai
Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Lainnya yang Berdaya Saing	14	8	6
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	5	3
Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius	4	1	3
Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	9	8	1
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12	7	5
Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi Dan Kearifan Lokal	4	4	0
Total	51	33	18
Persentase	100%	64,7%	35,3%

Sumber: LAKIP Kabupaten Banjarnegara tahun 2013

Berdasarkan data tersebut, dari 51 sasaran yang ditetapkan, sasaran yang dapat dicapai adalah sebanyak 33 sasaran atau sebesar 64,7%, dan 18 sasaran atau sebesar 35,3% tidak dapat tercapai. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja SKPD di Kabupaten Banjarmegara belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 BPK RI

GAMBAR 1.1. Opini LKPD dari Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2016, terjadi peningkatan atas opini yang dikeluarkan oleh BPK dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2013, Kabupaten Banjarnegara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), begitupun pada tahun 2014. Meskipun mendapatkan opini WTP dari BPK, namun Kabupaten Banjarnegara hanya mengeluarkan LAKIP sampai dengan tahun 2013, dan untuk tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Banjarnegara tidak mengeluarkan laporan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara masih kurang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menguji kembali mengenai kejelasan sasaran anggaran, sistem akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, karena masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti juga ingin menguji apakah *good governance* dapat memperkuat sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD: *Good Governance* (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Banjarnegara)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cahyani & Utama (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pada tahun 2016. Perbedaan lain adalah penggunaan variabel moderasi yaitu *good governance*, serta penggunaan daerah pemilihan sampel yang berbeda yaitu SKPD Kabupaten Banjarnegara.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar. Hal tersebut dikarenakan konsep *good governance* sangatlah luas. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada batasan tematik, yaitu berdasarkan latar belakang dan dukungan

tunjauan pustaka, maka implementasi *good governance* difokuskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, penerapan hukum, responsibilitas, dan keadilan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD?
4. Apakah *good governance* memperkuat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pengendalian akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sistem pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *good governance* memperkuat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi terutama pada bidang akuntansi sektor publik, dalam bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2. Bidang Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi SKPD Kabupaten Banjarnegara sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauhmana kinerja SKPD guna untuk mencapai pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar atau acuan

pihak-pihak terkait yang menyusun kebijakan baik untuk masyarakat maupun pegawai dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

- b. Bagi Investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya.